



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

Sosialisasi:

Penguatan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, 27 November 2023

Kerjasama Center for Digital Society
Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

SUMMARY EXECUTIVE

Mamuju, 27 November 2023

Kerjasama Center for Digital Society
Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat





PERJALANAN MOU CFDS UGM-Pemprov Sulbar

Dalam Penyelenggaraan SPBE



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator

2022	Buku Arsitektur dan Peta Rencana SPBE v1.0	Mencakup Studi Literatur, Survey, Analisa Kondisi Eksisting, Pembuatan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE as is (versi 1.0)	Indikator 11 Indikator 12
2022	Dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Mencakup aktivitas mendesain, verifikasi, update dan analisa visualisasi informasi	Reviu Indikator 11 dan Indikator 12



Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2022



Arsitektur Peta Rencana v3.0

Berikut adalah dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat Terkini bisa [Klik Disini](#). Isi bisa berubah dari masa ke masa



Arsitektur Peta Rencana v2.0

Berikut adalah dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 [Klik Disini](#). Isi bisa berubah dari masa ke masa



Arsitektur Peta Rencana v1.0

Berikut adalah dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 [Klik Disini](#). Isi bisa berubah dari masa ke masa

<https://sulbar.myspbe.id/#dashboard>



- Domain Layanan
- Domain Proses Bisnis
- Domain Data
- Domain Aplikasi
- Peta Rencana

Arsitektur SPBE | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Arsitektur Layanan

Nama Layanan

Ops

OPD

RAL Level-1

Referensi Arsitektur Level-1		Referensi Arsitektur Level-2	
RA	RAI	RAI	RAI
RA 01.01.01	RAI 01.01.01	RAI 01.01.01	RAI 01.01.01
RA 01.01.02	RAI 01.01.02	RAI 01.01.02	RAI 01.01.02
RA 01.01.03	RAI 01.01.03	RAI 01.01.03	RAI 01.01.03
RA 01.01.04	RAI 01.01.04	RAI 01.01.04	RAI 01.01.04
RA 01.01.05	RAI 01.01.05	RAI 01.01.05	RAI 01.01.05
RA 01.01.06	RAI 01.01.06	RAI 01.01.06	RAI 01.01.06
RA 01.01.07	RAI 01.01.07	RAI 01.01.07	RAI 01.01.07
RA 01.01.08	RAI 01.01.08	RAI 01.01.08	RAI 01.01.08
RA 01.01.09	RAI 01.01.09	RAI 01.01.09	RAI 01.01.09
RA 01.01.10	RAI 01.01.10	RAI 01.01.10	RAI 01.01.10

Jumlah Layanan
1,274

Layanan Terkait Lembaga Lain
919

Instansi
42

Jumlah Data
527

Jumlah OPD
42

Referensi Domain Data

Referensi Arsitektur Level-1

Referensi Arsitektur Level-2

Jumlah Data
527

Jumlah OPD
42

Statistik Domain Data

Data Berdasarkan Sifatnya

Data Berdasarkan Validasinya

Data per OPD

Perangkat Daerah	Jumlah Data...
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122
2. Dinas Kesehatan	86
3. Dinas Sosial	24
4. Dinas Lingkungan Hidup	19
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemad...	19
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pemad...	19
7. Dinas Kelautan dan Perikanan	15
8. Dinas Kearsifan, Perencanaan dan Statistk	14
9. Dinas Perencanaan dan Keperencanaan	14

Detail Metadata Data

Nama Data	Unsur Data	RAD Lvl-1	RAD Lvl-2	Jenis Data	Validasi Data	OPD
1. Data RA	Jumlah seluruh menenga...	RAD 06. Informasi Pendid...	RAD 06.01. Data Pendidik...	Publik	Insidental	Dinas Pendidikan dan Kab...
2. Data Penunjang Permo...	Data Terkait Surat Pemoo...	RAD 09. Informasi Pemer...	RAD 09.07. Data Kesek...	Publik	Tahunan	Biro Umum

Jumlah Aplikasi
201

Jumlah OPD Pemilik Aplikasi
33

Referensi Domain Aplikasi

Referensi Arsitektur Level-1

Referensi Arsitektur Level-2

Jumlah Aplikasi
201

Jumlah OPD Pemilik Aplikasi
33

Statistik Domain Aplikasi

Aplikasi Berdasarkan Engine Database

Aplikasi Berdasarkan Bahasa Pemrograman

Aplikasi per OPD

Perangkat Daerah	Jumlah
1. Dinas Lingkungan	25
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21
3. Rumah Sakit Umum Regional Daerah	19
4. Dinas Kesehatan	17
5. Dinas Transmigrasi	13
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keb...	11
7. Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil	10
8. Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10
9. Dinas Tenaga Kerja	8

Detail Metadata Aplikasi

Nama Aplikasi	Unsur Aplikasi	Fungsi Aplikasi	RAA Lvl-1	RAA Lvl-2	OPD
1. E-KEMERIA	mempunyai kinerja ASN	Mempermudah memajukan line...	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Adminstra...	Dinas Transmigrasi
2. Satu Data KHP	Validasi data hasil usaha petal...	Mempermudah validasi data ha...	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan P...	Dinas Kelautan dan Perikanan

Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator

2023	Reviu Arsitektur dan Peta Rencana v2.0	Mereview kelengkapan, validitas, dan kesesuaian arsitektur serta peta rencana dengan melakukan update pada dashboard Peta Rencana	Reviu Indikator 11 dan Indikator 12
2023	Buku Saku Tata Kelola TIK	Mencakup Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung 4 indikator tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Keterpaduan Rencana dan anggaran,2. Pembangunan Aplikasi SPBE,3. Layanan Pusat Data4. Sistem Penghubung Layanan Masing-masing indikator dicetak menjadi satu buku saku.	Indikator 13 Indikator 15 Indikator 16 Indikator 18
2023	Persiapan dan Pendampingan Audit Tools BRIN	Mencakup persiapan pemanfaatan Audit Tools BRIN dan pendampingan agenda audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Persiapan Pemenuhan Indikator 29 & Indikator 30
2023	Pedoman Manajemen Resiko SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 21
2023	Pedoman Manajemen Data SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Data SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 23



Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

SPBE

DASHBOARD KEBIJAKAN TATA KELOLA MANAJEMEN LAYANAN TOOLS

**Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Barat**

Menerapkan SPBE yang merupakan platform kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

<https://sulbar.myspbe.id/>



SPBE

DASHBOARD KEBIJAKAN TATA KELOLA MANAJEMEN LAYANAN TOOLS

Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.



Keterpaduan Rencana Anggaran SPBE



Pembangunan Aplikasi SPBE

pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

[LINK SOP](#)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

INFORMASI

Tanggal Pembuatan SOP: _____
 Tanggal Revisi: _____
 Tanggal Diklarifikasi: _____
 Disusun Oleh: _____
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Moderator: A. Sidiq, M.Pd
 NIP. 196504211991010001

Nama SOP: _____
 Integrasi Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

DAFTAR ISI

1. Maksud dan Tujuan: 1. Mendefinisikan 'Materi' Informasi
 2. Menentukan 'Materi' Informasi
 3. Menentukan 'Materi' Informasi
 4. Menentukan 'Materi' Informasi
 5. Menentukan 'Materi' Informasi

No	Uraian Kegiatan	Peta Jalur										Kategori	Waktu	Output	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 jam kerja	Surat Perintah	11	
2	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 jam kerja	Disposisi Pelaksanaan		
3	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 jam kerja	Berita Press/Informasi		
4	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 jam kerja	Berita Press/Informasi		
5	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 jam kerja	Berita Press/Informasi		
6	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2 jam kerja	Surat Code		
7	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 jam kerja	Surat Tugan		
8	Mengidentifikasi kebutuhan informasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2 jam kerja	Laporan Hasil Pelaksanaan		

TOOLS EVALUASI MANDIRI SPBE

Pedoman Menteri PANRB No. 6, 2023

Logo: SPBE, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, CFDS (Center for Digital Society)

Search: Pencarian Data Berubah Domain: Aspek: UIO/PIC:

Indikator	Nama Indikator	Nilai
Indikator 1	Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Des...	5
Indikator 2	Kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah ...	5
Indikator 3	Kebijakan internal manajemen data	4
Indikator 4	Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	4
Indikator 5	Kebijakan internal layanan Pusat Data	3
Indikator 6	Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerinta...	2
Indikator 7	Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan instas...	1
Indikator 8	Kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1

Klik pada grafik dan label untuk mendapatkan panduan kemalangan yang diinginkan



Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi dan pemenuhan maturitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait penyelenggaraan layanan pusat data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi



Draft SK Tata Kelola

Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator

2024	Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE v 3.0	Mencakup penyusunan regulasi pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Reviu Indikator 11 dan Indikator 12
2024	Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Aset TIK Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 24
2024	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE	Mencakup penyusunan regulasi pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 25
2024	Manajemen Pengetahuan SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 26
2024	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Layanan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Indikator 28

Keterangan: bisa ke depan dilanjutkan Manajemen Perubahan (indikator 27) dan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22) karena belum terlalu jelas rujukannya





Nanang Ruswianto, S.T, M.Kom

Koordinator **Evaluator SPBE** UGM (KemenPANRB) - UGM (2018-skrng)

Peneliti Smart City & SPBE, CFDS - Fisipol UGM (2018-sekarang)

Tim Koordinasi **Jogja Smart Province DIY (2018-sekarang)**

IT Konsultan (unit usaha UGM) sejak (2004 - sekarang)

CFDS Focus Area:

1. Digital Governance, including:
 1. Social Media and Politics
 2. E-democracy/digital democracy
 3. digital literacy for government
 4. eGovernment (SPBE)
2. Digital Economy, including
 1. Small and Medium Enterprises (SMEs) go online
 2. Financial Technology
 3. Development of e-commerce
3. Future Technology
 1. Artificial Intelligence
 2. Cloud Computing
 3. Data Analytics



CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada adalah pusat kajian yang berfokus dalam isu masyarakat digital. Didirikan pada tahun 2015, CfDS UGM berdiri di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.



Kerjasama Pemprov SulBar-CFDS UGM

Swakelola Tipe-2



2022

Arsitektur SPBE & Peta Rencana
Indikator 11&12



2023

Penyusunan Tata Kelola TIK (SOP
untuk 4 indikator: 13,15,16,18),
Penyiapan Audit TIK : Aplikasi dan
Infrastruktur

Manajemen Risiko dan Manajemen
Data



***2024**

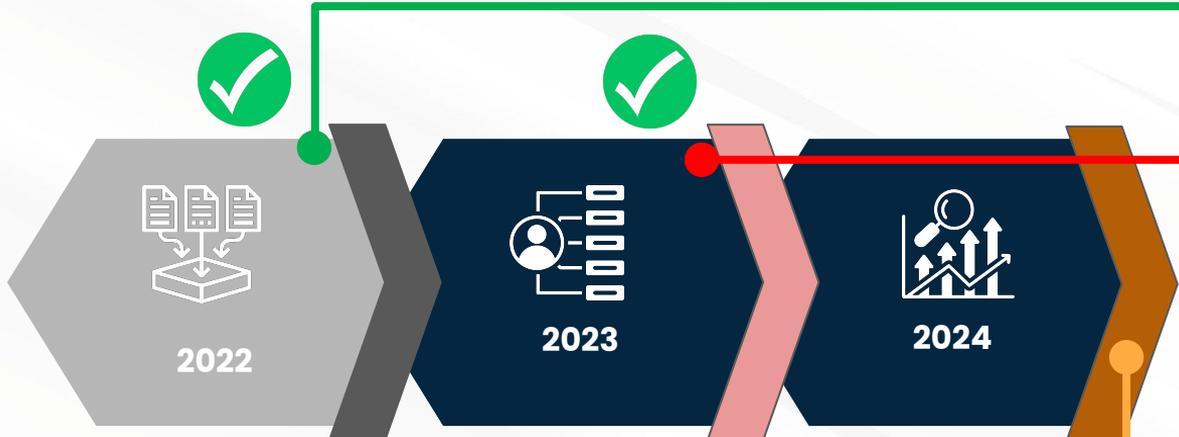
Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Manajemen Aset TIK, SDM,
Pengetahuan, Perubahan,
Keamanan Informasi dan Layanan



PERJALANAN MOU CFDS UGM Dengan Pemprov Sulbar

Dalam Penyelenggaraan SPBE



- 1. Untuk Pemenuhan **Indikator 11 dan 12** (PermenpanRB 59, 2020)
- 2. Pondasi **Keterpaduan** dan **Keberlanjutan TIK**
- 3. Bagian dari agenda **Reformasi Birokrasi**



- 1. **Menjaga** tingkat kematangan **indeks SPBE** dan peningkatan bertahap
- 2. Memastikan **Tata Kelola** dan **Manajemen TIK terpadu** dan **berkelanjutan**



- 1. **Menjaga** tingkat kematangan **indeks SPBE**
- 2. Memastikan **Tata Kelola** dan **Manajemen TIK terpadu** dan **berkelanjutan**
- 3. **Integrasi Layanan** Tematik bertahap menuju **data driven government**



- 1. Penyusunan Arsitektur (6 domain) dan Peta Rencana (7 Muatan) V1.0 (Done)
- 2. Dashboard Money Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (Done)

- 1. **Reviu Penajaman Arsitektur dan Peta Rencana (v2.0)**
- 2. Penyusunan Dokumen Tata Kelola
- 3. Pendampingan audit infrastruktur dan audit aplikasi
- 4. Menyusun dan Memandu pedoman Manajemen Data dan Risiko

- 1. Reviu Penajaman Arsitektur dan Peta Rencana (v3.0)
- 2. Mendampingi Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen dan Pengembangan Integrasi Layanan
- 3. Menyusun dan Memandu pedoman Manajemen TIK lainnya

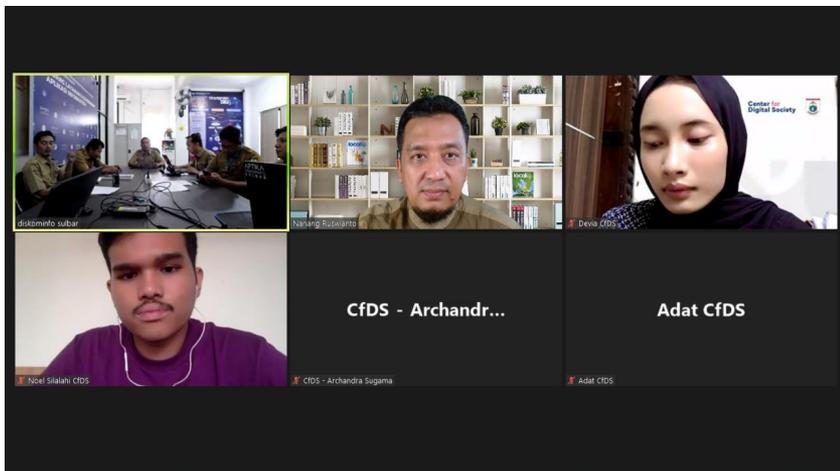
Sasaran



1. Terwujudnya **tata kelola** pemerintahan yang **efisien** melalui pemanfaatan TIK yang **komprehensif**.
2. **Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang mencakup empat indikator dari tata kelola TIK antara lain; **keterpaduan rencana dan anggaran, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data dan sistem penghubung layanan.**
3. **Pendampingan** penyiapan keperluan **audit SPBE** Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. **Meningkatkan nilai indeks SPBE** Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023.
5. Terwujudnya pengelolaan **manajemen risiko, dan manajemen data** SPBE di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

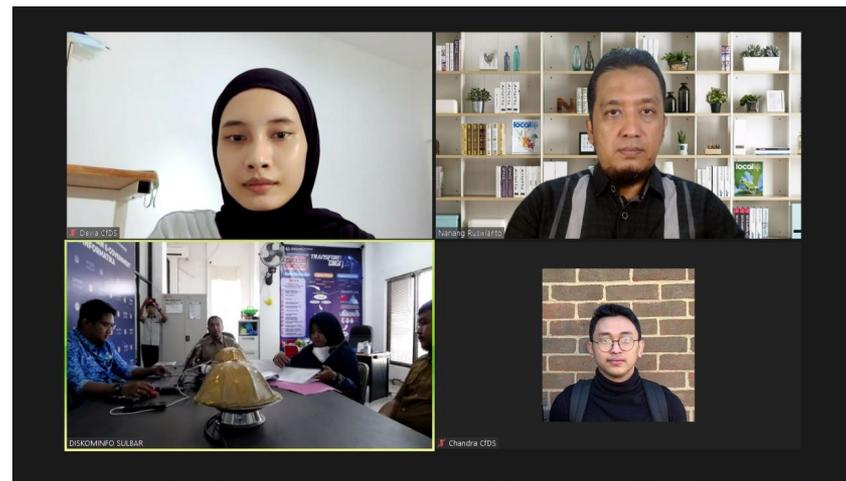


DOKUMENTASI KEGIATAN (jan-feb 2023)



Selasa, 10 Januari 2023 | Dikbud

42 OPD sudah melakukan penajaman



Selasa, 17 Januari 2023 | BPKPD

SULBAR_Metadata_Arsitektur_DinasKelautanPerikanan

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Last edit was 6 minutes ago

100% You are screen sharing Stop sharing

Non Tender (Pengadaan Langsung)

No	Nama Bisnis/Usuan	Uraian Proses Bisnis	-- RAB Level 1 Nasional (Dependency)	-- RAB Level 2 (Dependency)	Instansi
1	Pengadaan Tender	Subah proses pembelian penyedia barang dan jasa dengan persyaratan dan kualifikasi tertentu	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Non Tender (Pengadaan Langsung)	Subah proses pembelian penyedia barang dan jasa oleh pejabat pengadaan tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Layanan Informasi data	Pelaporan produksi kelautan dan perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Layanan informasi data pelaku perikanan	Inventarisasi pelaku usaha perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Layanan informasi pengendalian residu	Pelaporan hasil pengambilan sampel limbah	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Layanan informasi pemantauan penyakit ikan	Pelaporan hasil pengujian sampel penyakit ikan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan)	Profil dan jumlah pelabuhan perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Daerah)	Jumlah Izn SIPI (Surat Izn Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izn Kapal Pengangkut Ikan), SILP (Surat Izn Usaha Penangkapan Ikan), STKA (Surat Tanda Kapal Andon), TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Pengelolaan Ruang Laut Sampal Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Layanan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Layanan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04. Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
12					



Selasa, 24 Januari 2023 |
Dinas Kelautan & Perikanan

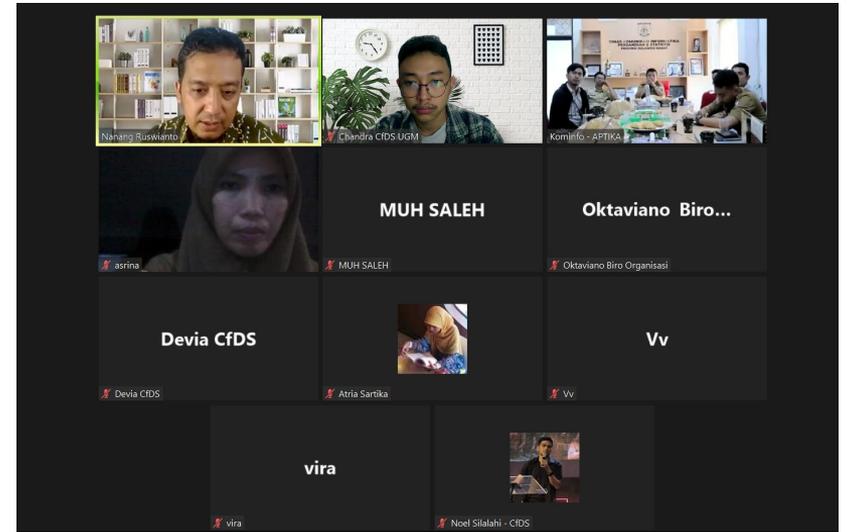


Chandra CfDS

Selasa, 31 Januari 2023 | Dinas Kehutanan



Selasa, 7 Februari 2023 |
Dinas Perkebunan & DLH



Selasa, 14 Februari 2023 | Kelompok 1



SULBAR_New Isian Gabungan Kolom Abacus

K21	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Instansi	Akronim	PIC	Tgl Penajaman	STATUS	D-Layanan	D-Probis	D-Data	D-Aplikasi	Link File
16	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	ESDM		21 February 2023						https://docs.google.com/document/d/7z3hZ9F1E...
17	Dinas Kehutanan	Dishut	Siti Nabila	31 January 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1M7jKbVQV...
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP	Rusman	24 January 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1y3jyC9o9p5...
19	Dinas Kesehatan	Diskas		14 February 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1K5Gw92c...
21	Dinas Ketahanan Pangan	Ketapang		14 February 2023		BELUM	BELUM	BELUM	BELUM	https://docs.google.com/document/d/1knayz2IA57...
20	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	Diskominfo Pers		21 February 2023						
22	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Icah	7 February 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1DWW0IC1B8...
23	Dinas Pariwisata	Dispar		21 February 2023						
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR		14 February 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1SDUj5Eg7L1...
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispora		28 February 2023						https://docs.google.com/document/d/1A0C9U4949...
27	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	DPMPPTSP		14 February 2023		BELUM	BELUM	BELUM	BELUM	https://docs.google.com/document/d/1GAWF7h5G5...
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINBUD	Nurhalisa	10 January 2023	OK	OK	OK	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1Sx2Zr1D3S...
30	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil*	Dukcapil		14 February 2023		OK	BELUM	OK	OK	https://docs.google.com/document/d/1nvt0QhZw83...
32	Dinas Perhubungan	DISHUB								
33	Dinas Perkebunan	Disbun	Awal	7 February 2023		OK	BELUM	OK	BELUM	https://docs.google.com/document/d/1GzZr9JAL...
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpus		21 February 2023						https://docs.google.com/document/d/1GzZr9JAL...

Selasa, 21 Februari 2023 | Kelompok 3



Recording:

<https://drive.google.com/drive/folders/12WGEcawHm0INTELzOMN7LCjFwXJYzEzb?usp=sharing>



Sulbar_Penajaman Data OPD [Khusus]

Cascading | Ilustrasi

Visi -> Misi -> Sasaran -> Program Strategis (Kesehatan)

Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan kepada seluruh kalangan masyarakat

Proses Bisnis untuk mendukung Layanan Kesehatan
Mempersiapkan Kegiatan Sosial Lingkungan
Memastikan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Melakukan Pengantaran 24 jam Layanan Primer

Data yang dikelola di setiap Proses Bisnis
Pasien,
Faskes,
Obat,
Limbah Kesehatan dll

Apikasi Pendu
SPQDT, SIMRS, S...

Click to add speaker notes

Selasa, 28 Februari 2023 | Kelompok 4

Manajemen Risiko dan Data

Google Sheets interface showing a risk management checklist. The main content is a table with columns for 'No', 'Risiko terkait IT', 'Penyebab', and 'Dampak'. A sidebar on the right shows a Zoom meeting with participants: Nansing Ruswanto, Komfio - APTIKA, Devia CfDS, and Noel Silalahi.

No	Risiko terkait IT	Penyebab	Dampak
8	Risiko yang terjadi di instansi anda (pilih memilih dari pilihan berikut atau menambahkan yang baru)	Penyebab dari resiko tersebut	Dampak dari resiko tersebut
1	<input type="checkbox"/> Luas coverage wifi tidak menjangkau ke seluruh ruangan kantor	kekuatan perangkat akses point yang kurang	menghambat kerja yang membutuhkan koneksi internet
2	<input type="checkbox"/> Kecepatan internet lambat	usia perangkat akses point yang sudah diatas 5 tahun	masalah adaptem, masalah koordinasi
3	<input type="checkbox"/> Lambatnya kinerja Komputer	banyak virus, umur perangkat sudah diatas 7 tahun	kinerja pegawai jt tidak maksimal
4	<input type="checkbox"/> Sistem informasi error	kemua virus	pekerjaan dan pelaporan jt terhambat
5	<input type="checkbox"/> Sistem informasi yang belum tersedia untuk menunjang ketugasan	belum ada aplikasi yang tersedia, masih dalam pengembangan, vendor tidak support lagi dll	operasional perkerntaran tidak optimal
6	<input type="checkbox"/> Sistem informasi yang belum dimanfaatkan dengan baik	fitur belum sesuai, tampilan kurang menarik	operasional perkerntaran tidak optimal, pelaporan ke pimpinan juga tidak maksimal
7	<input type="checkbox"/> Sistem informasi down/offline	kelelahan, spesifikasi server kurang sesuai	pekerjaan dan pelaporan jt terhambat
8	<input type="checkbox"/> Sistem Informasi dari Kementrian		
9	<input type="checkbox"/> Terjadinya Hacking		

Zoom Meeting interface showing a meeting with participants: Komfio - APTIKA, Devia CfDS, and Hafiz CfDS. The meeting title is 'Pendahangan Persiapan Audit Aplikasi SPBE'.

Pendahangan Persiapan Audit Aplikasi SPBE

Audit dgn Tools BRIN

Persyaratan Audit Eksternal SPBE dengan BRIN

- Kebijakan internal audit TK: IPPD
- Peta Rencana Audit TK (ada dalam Peta Rencana SPBE IPPD)
- SK Tim Audit
 - Tim Audit Aplikasi
 - Aplikasi 1: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Aplikasi 2: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Aplikasi 3: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Tim Audit Infrastruktur
 - Jaringan Intra Pemerintahan
 - Sistem Penghubung Layanan
- Email ke: insan.audit@bptp.go.id (melampirkan SK Tim audit)
 - Dapat user id
 - Lakukan audit dengan mengesal
 - <https://audi.infrastruktur-aplikasi.tool.go.id/webmail/0/>

Zoom Meeting interface showing a meeting with participants: Komfio Ruswanto, Nansing Ruswanto, and Hafiz CfDS. The meeting title is 'Pendahangan Persiapan Audit Infrastruktur SPBE'.

Evaluasi SPBE | 47 indikator

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	Pilihan Saundara
Indikator 29	Tingkat kesiapan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Pertanyaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE?	
Level 1	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.			
Level 2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman Audit Infrastruktur.			
Level 3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.			
Level 5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil Audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan infrastruktur.			
Penjelasan:				
Data dukung:				

Kepmenpan RB 962/2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi SPBE

Pendahangan Persiapan Audit Infrastruktur SPBE

Ruang Lingkup



<https://sulbar.myspbe.id/>

1	Buku Saku Tata Kelola TIK	Mencakup Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung 4 indikator tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpaduan Rencana dan Anggaran, 2. Pembangunan Aplikasi SPBE, 3. Layanan Pusat Data 4. Sistem Penghubung Layanan Masing-masing indikator dicetak menjadi satu buku saku.	Done 
2	Persiapan dan Pendampingan Audit Tools BRIN	Mencakup persiapan pemanfaatan Audit Tools BRIN dan pendampingan agenda audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Done 
3	Pedoman Manajemen Resiko dan Manajemen Data SPBE	Mencakup penyusunan regulasi pedoman Manajemen Risiko dan Manajemen Data SPBE Pemprov. Sulawesi Barat	Done 

Draft SK Ka Dinas Kominfo | Buku Saku Tata Kelola TIK



<https://tinyurl.com/sulbardraftsk>

Draft-Surat Keputusan SOP Layanan Pusat Data .DOCX

File Edit View Insert Format Tools Help

Normal text Book ... 11 B I U A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT DATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi dan pemenuhan maturitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait penyelenggaraan layanan pusat data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

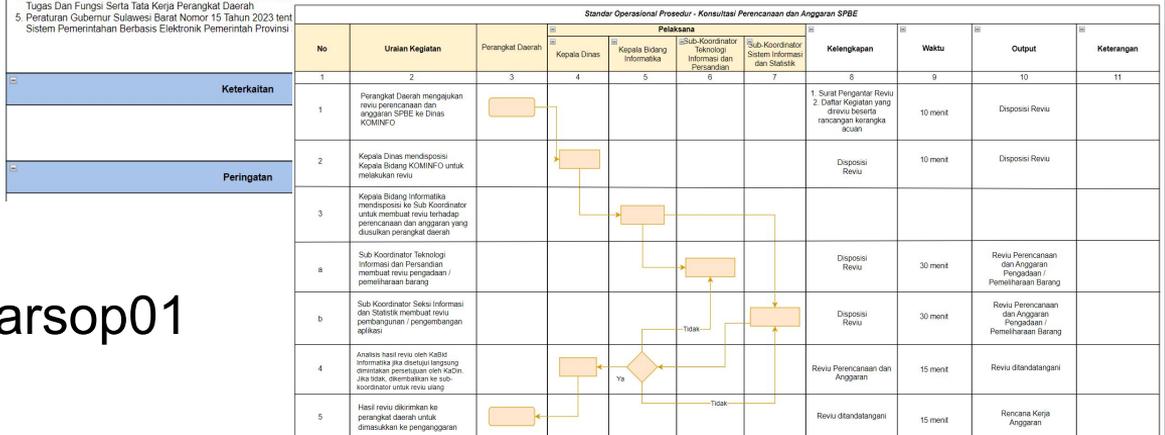
b. Bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Buku Saku-1 | SOP Keterpaduan Rencana Anggaran SPBE



<https://tinyurl.com/sulbarsop01>

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Nomor SOP (NOMOR SOP) Tanggal Pembuatan SOP Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika <u>Mustari Mula, S.Sos., M.AP</u> NIP. 1968042419881010001
	Nama SOP Konsultasi Perencanaan dan Anggaran SPBE
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi	1. Memiliki pengetahuan Manajemen Keuangan 2. Memiliki pengalaman dan kemampuan Perencanaan dan Penganggaran kegiatan 3. Mampu memahami laporan keuangan dan studi kelayakan bisnis



Buku Saku-2 | SOP Pembangunan Aplikasi SPBE



<https://tinyurl.com/sulbarsop02>

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana						
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		1. Memahami teknis pembangunan aplikasi 2. Mengerti manajemen proyek pengembangan aplikasi						
Keterkaitan		Standar Operasional Prosedur - Pembangunan/Pengembangan Aplikasi						
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		OPD	Diseminasi	Tim Pengembangan Aplikasi				
1	Mengusulkan pembangunan/pengembangan aplikasi	Mulai			Surat Permohonan	1 hari kerja	Surat Permohonan	TALUAP PERENCANAAN
2	Memeriksa apakah usulan aplikasi sudah ada di peta rencana SPBE		Tidak	Ya	Peta Rencana SPBE	1 hari kerja	Surat Balasan	
3	Melakukan revisi peta rencana SPBE		Ya	Ya	1. Usulan pembangunan/pengembangan aplikasi 2. Peta rencana sebelum revisi	1 hari kerja	Pengumpulan Data OPD	
4	Melakukan verifikasi apakah pengajuan revisi peta rencana SPBE dapat dipenuhi		Tidak		1. Proses bisnis OPD 2. Layanan OPD	3 hari kerja	Peta Rencana SPBE Terbaru	
		Selesai						

Buku Saku-3 | SOP Layanan Pusat Data



<https://tinyurl.com/sulbarsop03>

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana						
<p>1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> <p>3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat</p>		<p>1. Memiliki pengetahuan Teknologi Informasi</p> <p>2. Memiliki pengetahuan Sistem Informasi</p> <p>3. Memiliki pengetahuan Keamanan Informasi</p> <p>4. Memiliki kemampuan literasi komputer dan mengoperasikannya dengan baik</p> <p>5. Memiliki pengetahuan infrastruktur dan jaringan</p>						
Keterangan		Standar Operasional Prosedur - Akses Ruang Pusat Data						
No	Uraian Kegiatan	Pembanyu			Keterangan	Waktu	Output	Keterangan
		01 Pengunjung	02 Staf / Tim	03 Sub-Koordinator				
1	Melakukan pemeliharaan lingkungan sesuai Kelembagaan Keamanan Informasi				1. Start Tapes/Server Pabrik dan di (KIP/ISMS/IS)	15 menit		
2	Mengisi formulir kunjungan dan menyerahkan dikelembagaan di				1. Formulir Kunjungan 2. Identifikasi pengunjung (KIP/ISMS/IS)	30 menit	Formulir Kunjungan	
3	Memeriksa kelengkapan formulir kunjungan dan menanggapi kuratias mika Pengunjung				1. Formulir Kunjungan 2. Identifikasi pengunjung (KIP/ISMS/IS)	30 menit		
4	Melakukan verifikasi formulir kunjungan				1. Formulir Kunjungan	1 jam		
5	Menyampaikan keputusan izin kunjungan				1. Disposisi 2. Formulir Kunjungan	1 hari kerja		
6	Melakukan pendampingan dan pengawasan selama proses kunjungan				1. Tenda pengawal Kunjungan	1 hari kerja		
7	Melakukan pencatatan atau keluar mika pengunjung pada ruang Ruang Pusat Data				1. Tenda pengawal Kunjungan 2. Buku Penetapan Keluar-Masuk	1 hari kerja		1. Dokumen pencatatan Keluar-Masuk

Buku Saku-4 | SOP Sistem Penghubung Layanan



<https://tinyurl.com/sulbarsop04>

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Nomor SOP Tanggal Pembuatan SOP Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	(NOMOR SOP) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika										
	Nama SOP	Integrasi Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah										
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana										
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah		1. Memiliki pengetahuan Teknologi Informasi 2. Memiliki pengetahuan Sistem Informasi 3. Memiliki pengetahuan Keamanan Informasi 4. Menguasai Pengoperasian Komputer 5. Memiliki pengetahuan Infrastruktur dan Jaringan										
Ket	Peleaksana								Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Perit	1. SOP Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Apabila SOP ini tidak dijalankan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan rencana dan tidak efektifitas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Mengajukan permohonan Integrasi Aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan					Diinput, Diinputkan surat permohonan				1 jam kerja	Surat Permohonan	
		2		2	2					1 jam kerja	Disposisi Permohonan	
		3	3			Diinput, Memeriksa surat permohonan integrasi				1 hari kerja	Berkas Persetujuan	
		4	4			Diinput, Memeriksa berkas persyaratan				2 jam kerja	Berkas Persetujuan	
						5				3 jam kerja		
							6			2 hari kerja	Source Code	
							7			3 jam kerja	Surat Tugas	
							8			3 hari kerja	Laporan Hasil Pemeliharaan	
								9		2 jam kerja		

Audit SPBE

Sesuai PermenPANRB 59 2020,



Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4.50%	27.27%		
Indikator 29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1.50%	33%	5	1
Indikator 30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1.50%	33%	3	1
<u>Indikator 31</u>	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1.50%	33%	5	1

Sesuai PermenPANRB 59 2020,
Ruang lingkup Audit Infrastruktur Meliputi:

1. Jaringan Intra Pemerintah
2. Sistem Penghubung Layanan

Ruang lingkup Audit Aplikasi Meliputi:
3 Aplikasi Khusus (Daerah)

Audit SPBE

Instansi Pemerintah meningkatkan indeks SPBE sebesar **(4.5%)**.

(Permenpan RB no 59 Tahun 2020)

Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE

Audit dgn Tools BRIN

Persyaratan Audit Eksternal SPBE dengan BRIN

- Kebijakan internal audit TIK IPPD
- Peta Rencana Audit TIK (ada dalam Peta Rencana SPBE IPPD)
- SK Tim Audit :
 - Tim Audit Aplikasi
 - Aplikasi 1: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Aplikasi 2: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Aplikasi 3: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Tim Audit Infrastruktur :
 - Pusat Data : Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Jaringan Intra Pemerintah
 - Sistem Penghubung Layanan
- Email ke : layananauditspbe@bppt.go.id (melampirkan SK Tim audit)
 - Dapat user id
 - Laksanakan audit dengan mengakses

<https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/>



Metodologi

- Penugasan audit TIK
- Menentukan ruang lingkup audit dan menyusun audit plan
- Penyusunan Tim Auditor dan Auditee (Independensi, Profesionalisme, Kompetensi Auditor dan Auditee)
- Persetujuan dan finalisasi audit plan
- Mengumpulkan kriteria teknis dan peraturan perundang-undangan
- Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan

Perencanaan



Pelaksanaan

- Koordinasi dari Briefing Tim Auditor dengan Tim Auditee
- Presentasi ke manajemen dan pejabat terkait
- Pelaksanaan audit dan tinjauan lapangan
- Verifikasi data audit
- Konfirmasi setiap jawaban antara auditee dan auditor



- Koordinasi dari Briefing Tim Auditor dengan Tim Auditee
- Presentasi ke manajemen dan pejabat terkait
- Pelaksanaan audit dan tinjauan lapangan
- Verifikasi data audit
- Konfirmasi setiap jawaban antara auditee dan auditor

Tindaklanjut

Ruang Lingkup Audit Aplikasi SPBE

Manajemen

2

1. Manajemen Risiko
2. Manajemen SDM
3. Manajemen Data
4. Manajemen Perencanaan Layanan

5. Manajemen Pengetahuan
6. Manajemen Perubahan
7. Manajemen Aset
8. Manajemen Pengembangan Layanan

9. Manajemen Operasional Layanan

10. Manajemen Sistem Pengendalian Internal

Tata Kelola

1

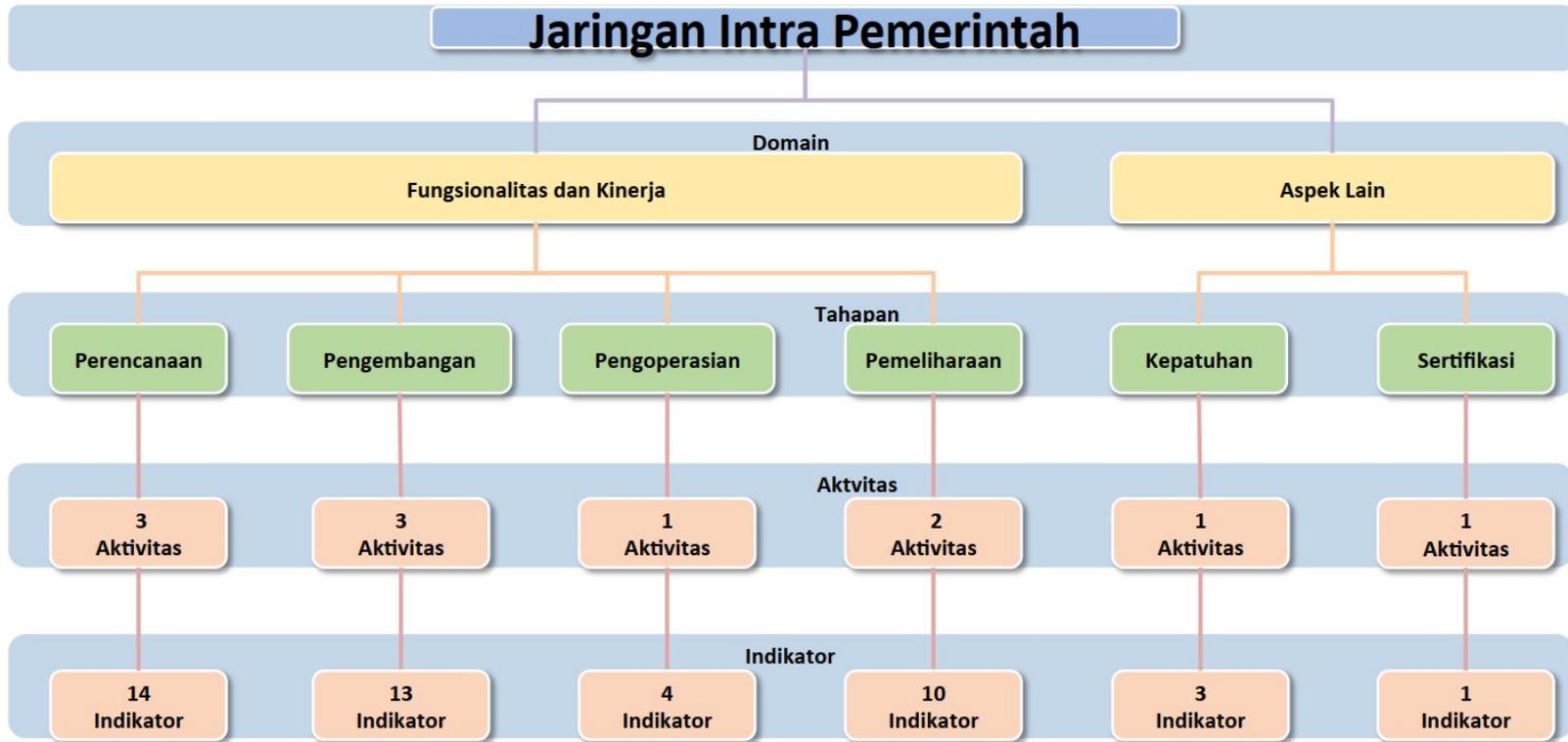
1. Evaluasi Tata Kelola
2. Pengarahan Tata Kelola
3. Pemantauan Tata Kelola

Fungsionalitas dan Kinerja

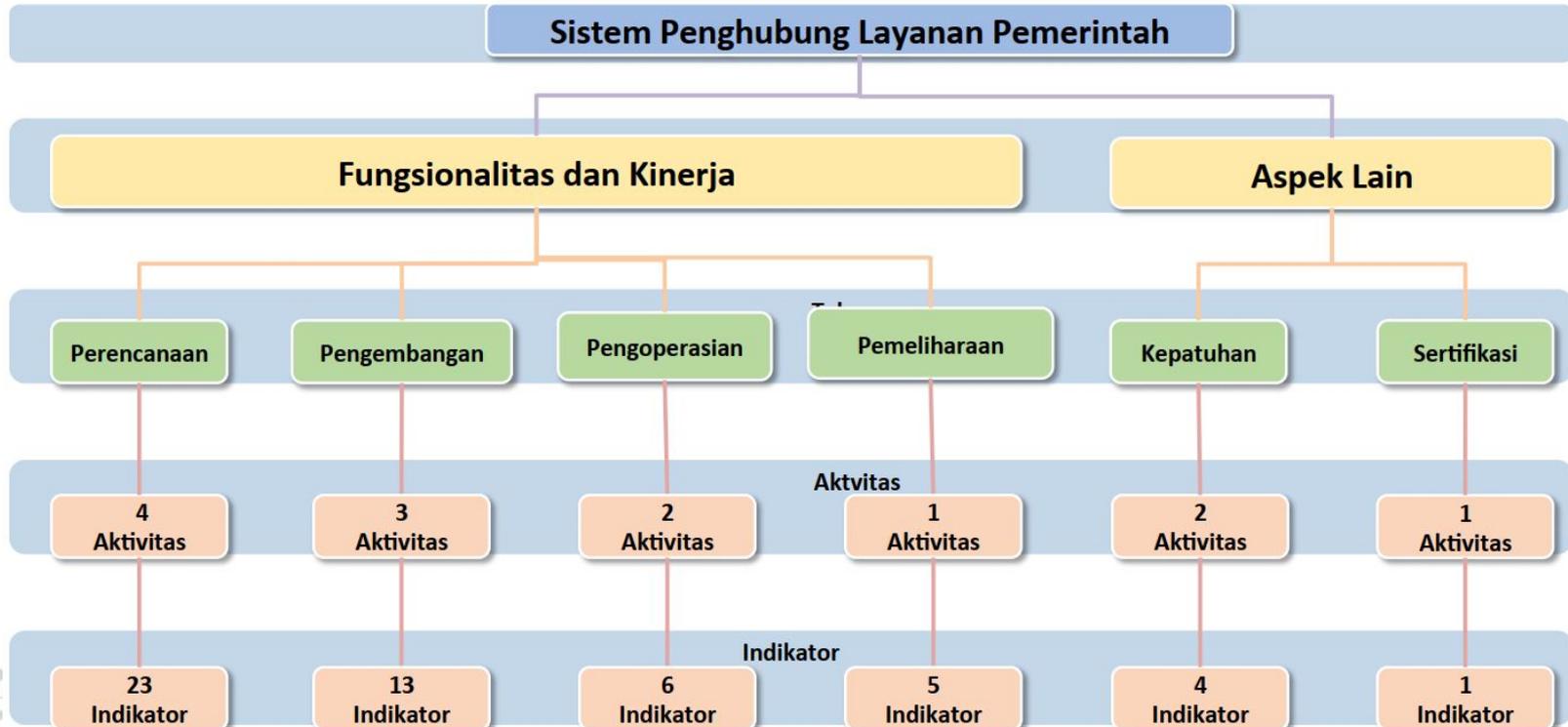
3

1. Perencanaan
2. Pengembangan
3. Pengoperasian
4. Pemeliharaan

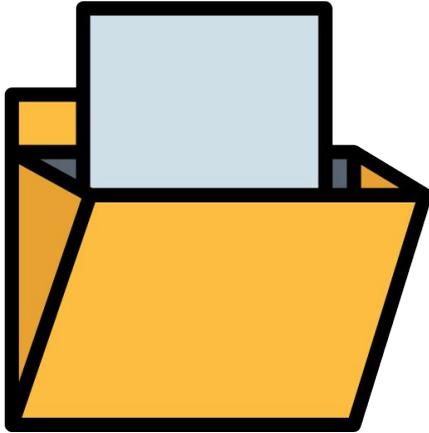
Struktur Audit JIP



Struktur Audit SPLP



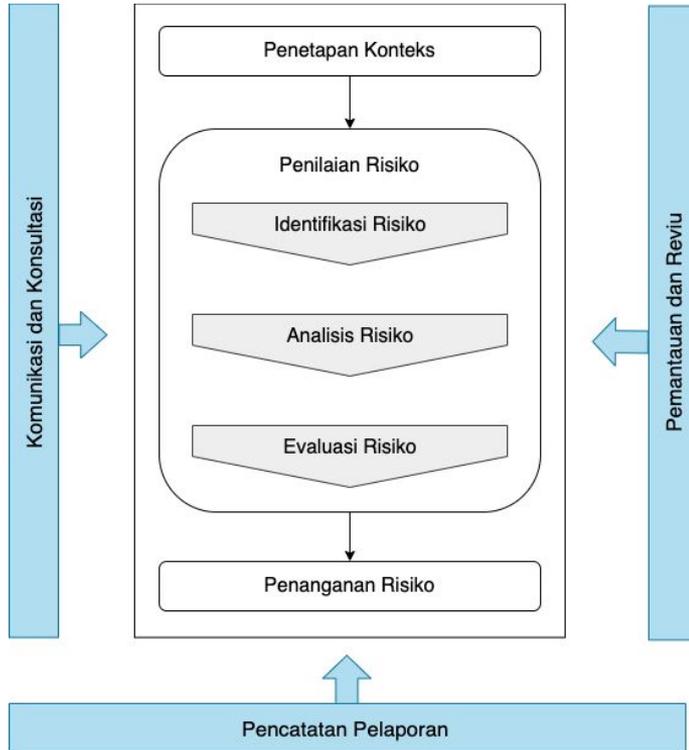
Kebutuhan Dokumen dalam Audit Aplikasi & Infra SPBE



1. Struktur Organisasi Diskominfo
2. Dokumen Arsitektur & Peta Rencana SPBE
3. Dokumen terkait 8 Jenis Manajemen SPBE : (Risiko, Keamanan Informasi, Data, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, Layanan)
4. Dokumentasi Aplikasi Khusus
5. Source Code Aplikasi dalam GIT
6. SOP TIK
7. Topologi Jaringan
8. SPLP / API Gateway

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko spt dilakukan dengan **mengidentifikasi kondisi eksisting** dari penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.



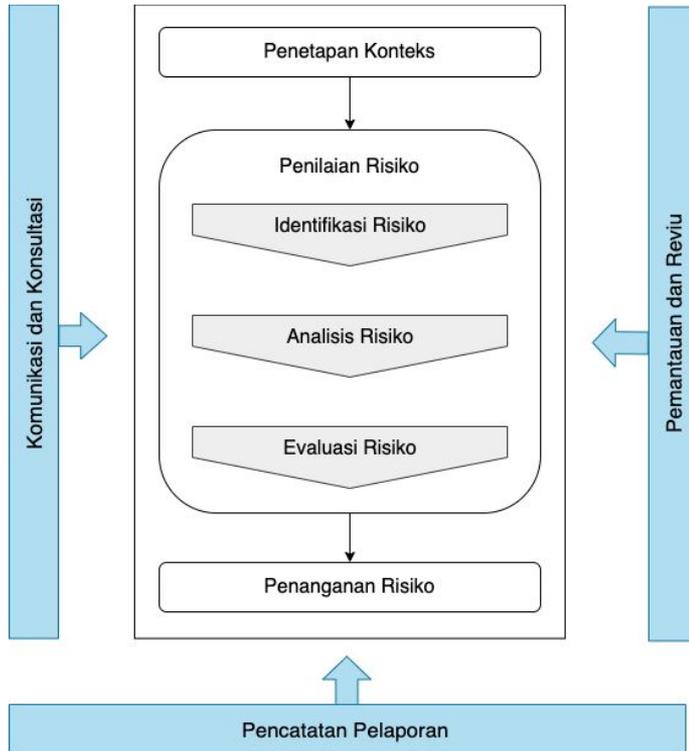
1. Penetapan Konteks

Mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan dari risiko SPBE, antara lain:

- a. Sasaran dan target kinerja
- b. Kategori risiko:
 1. Rencana Induk & Arsitektur SPBE Daerah
 2. Peta Rencana SPBE
 3. Proses Bisnis
 4. Rencana dan Anggaran
 5. Inovasi SPBE Daerah
 6. Kepatuhan
 1. Tata Kelola Implementasi
 2. Data dan Informasi
 3. Infrastruktur SPBE
 4. Aplikasi SPBE
 5. SDM SPBE
 6. Bencana Alam

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko spt dilakukan dengan **mengidentifikasi kondisi eksisting** dari penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.



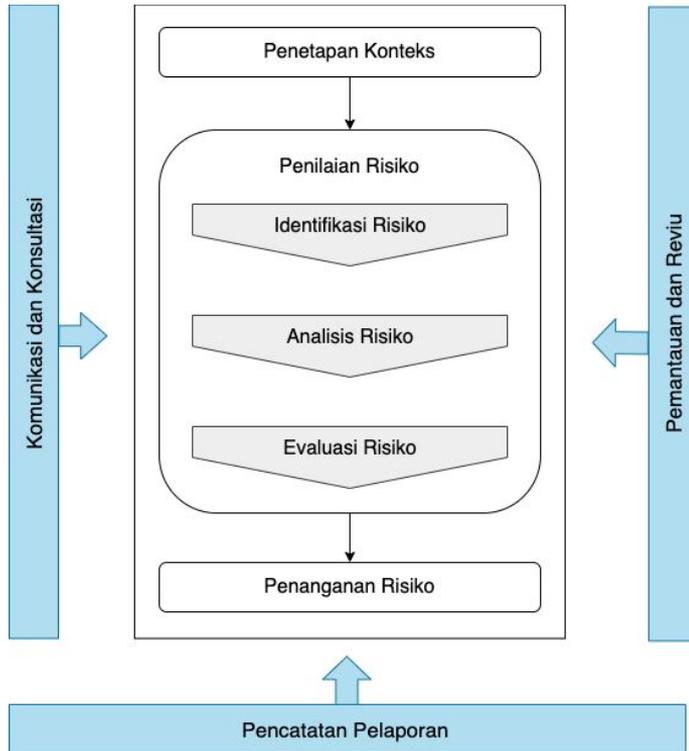
1. Penetapan Konteks

Mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan dari risiko SPBE, antara lain:

- c. Area dampak risiko
 - Finansial
 - Reputasi
 - Kinerja
 - Layanan Organisasi
 - Operasional dan Aset TKI
 - Hukum dan Regulasi
 - Sumber Daya Manusia
- d. Kriteria Kemungkinan
- e. Kriteria Dampak
- f. Level Risiko
- g. Selera Risiko

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko spbe dilakukan dengan **mengidentifikasi kondisi eksisting** dari penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.



2. Penilaian Risiko SPBE

Memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak yang dapat terjadi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko SPBE lebih lanjut.

3. Penanganan Risiko SPBE

Tahapan ini sebagai mitigasi penyebab risiko SPBE yang terdiri dari:

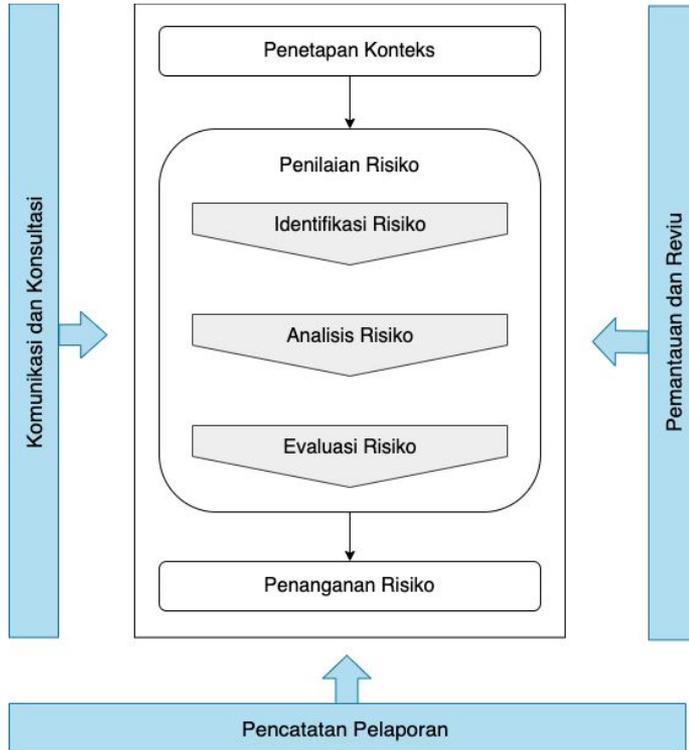
- a. Eskalasi Risiko
- b. Eksploitasi Risiko
- c. Peningkatan Risiko
- d. Pembagian Risiko
- e. Penerimaan Risiko

4. Komunikasi dan Konsultasi

Menyediakan, membagikan, mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan stakeholders melalui kegiatan (survey, meeting, dan *focus group discussion*).

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko spt dilakukan dengan **mengidentifikasi kondisi eksisting** dari penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.



5. Pemantauan reviu

Memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi risiko SPBE serta mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses manajemen risiko SPBE.

6. Pengendalian

Pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN

Manajemen Risiko

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.	-
2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE2. Kajian & Form Manajemen Risiko Umum yang belum memuat scope SPBE
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE.	Kajian & Form 2.1-4.0 yang telah terisi yang terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.	<ol style="list-style-type: none">1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE2. Notulensi Rapat atas reviu penerapan manajemen risiko SPBE di seluruh OPD3. Photo kegiatan komite manajemen risiko
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.	Pembaharuan / update Form daftar risiko beserta rencana mitigasi risikonya

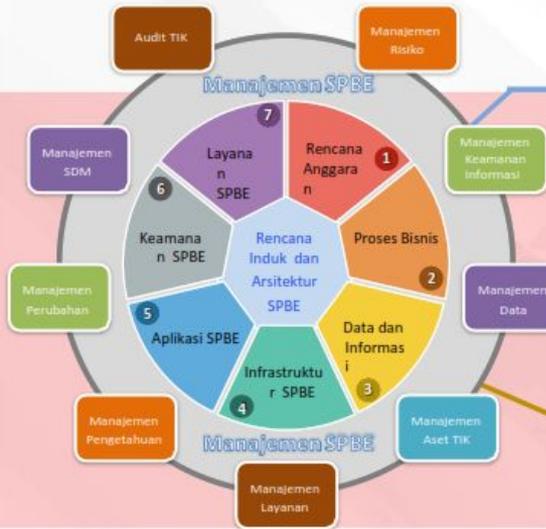


FORMULIR: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K-xH1jx3qCCt_QjdV4Dr9QwiExFsthpO/edit#gid=1563508905

SPBE DAN DATA

SPBE yang berkualitas mendukung Data yang berkualitas

RUANG LINGKUP SPBE



Perpres No.95 Tahun 2018
Tentang SPBE

SINERGI PROGRAM

Arsitektur Data

Permen No. 16 Tahun 2020
Tentang Manajemen Data
SPBE

Pedoman
Manajemen Data

Big Data dan AI
Pemerintah

RUANG LINGKUP SATU DATA INDONESIA

Prinsip Satu Data
Indonesia

- Standar Data
- Metadata Baku
- Interoperabilitas Data
- Kode Referensi dan Data Induk

Penyelenggara
Satu Data
Indonesia

- Penyelenggara Tingkat Pusat
- Penyelenggara Tingkat Daerah

Penyelenggaraan
Satu Data
Indonesia

- Perencanaan Data
- Pengumpulan Data
- Pemeriksaan Data
- Penyebarluasan Data

Perpres No.39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia



*"We are sitting on a
gigantic pile of data"*

Data yang berkualitas mendukung SPBE yang berkualitas

MANDAT MANAJEMEN DATA | REGULASI NASIONAL (Perpres 95, 2018)

Pembobotan

Domain 1: Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE

Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

Domain 3: Manajemen SPBE

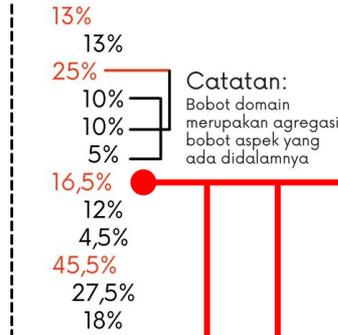
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

Aspek 6: Audit TIK

Domain 4: Layanan SPBE

Aspek 7: Layanan Adm. Pem. Berbasis Elektronik

Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik



Manajemen Data

bertujuan untuk **menjamin** terwujudnya **data** yang **akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses** sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Proses Manajemen Data

dilakukan melalui pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data



Kolaborasi

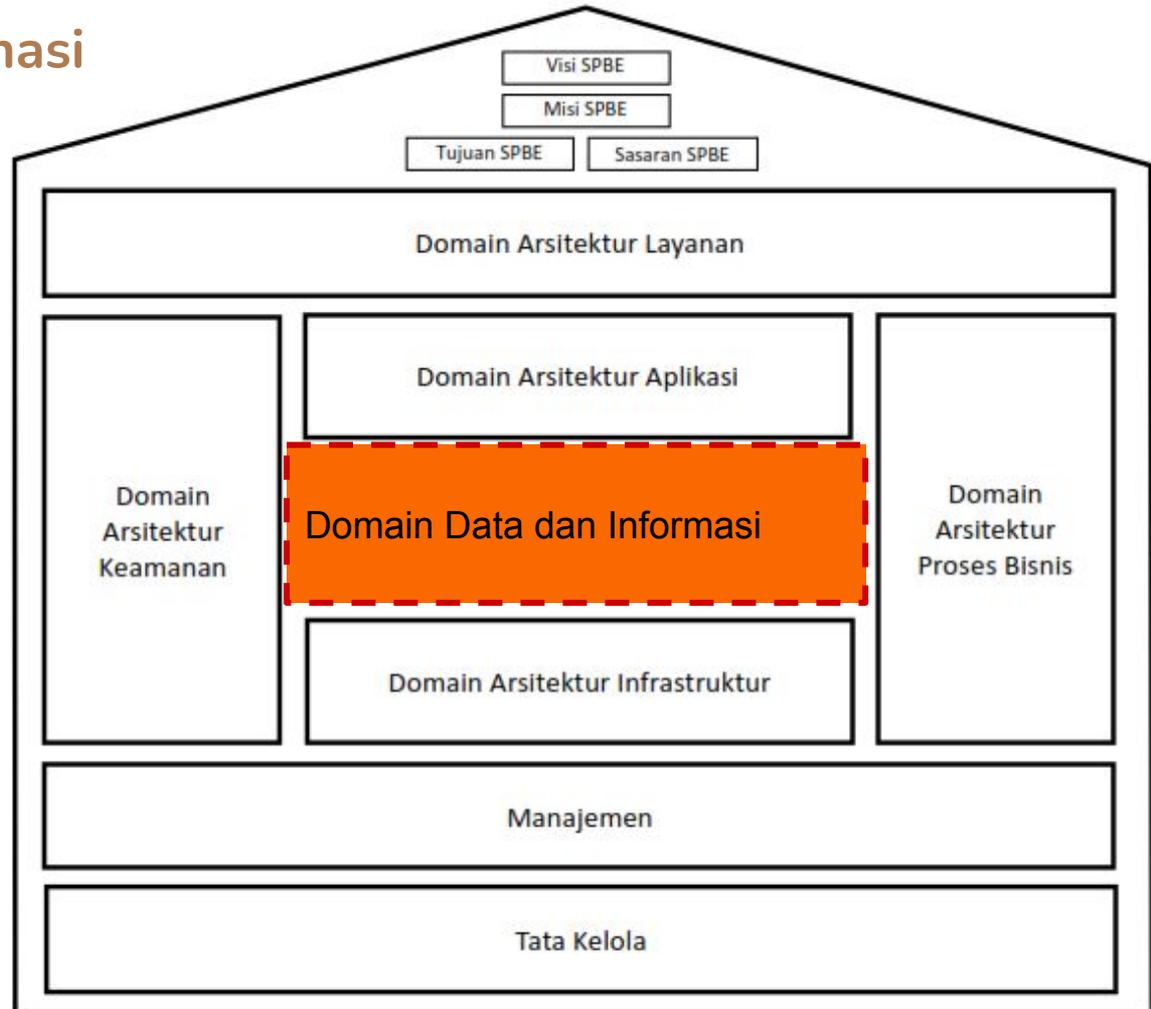
dilakukan bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional (Kemendagri/Bappenas)



Arsitektur Data Informasi

Prinsip yang Perlu diperhatikan:

- 1) Data harus dikumpulkan dan dipelihara secara terintegrasi untuk mendukung kebutuhan;
- 2) Data merupakan aset yang dapat diperbarui dan dapat digunakan kembali;
- 3) Data harus mempunyai kualitas dan integritas setinggi mungkin untuk dapat digunakan dalam mengambil keputusan;
- 4) Data harus disimpan atau ditempatkan di struktur dan lokasi paling sesuai untuk pemanfaatan yang optimal;
- 5) Data yang sifatnya dinamis harus diperbaharui setiap saat;
- 6) Data harus bisa dibagi pakaikan untuk kebutuhan bersama



Ownership Matrix | R.A.C.I

Instansi	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Biro Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Biro Umum	Data Persuratan Pimpinan	Data Surat Masuk dan Surat Keluar pimpinan	Arsip, identifikasi dan analisis surat masuk dan keluar pimpinan	A/R			I			
Biro Umum	Data Keprotokolan	Data kegiatan pimpinan dan tamu pimpinan	Arsip, identifikasi dan analisis kegiatan pimpinan dan tamu pimpinan	A/R			I			
Biro Umum	Data Layanan kerumah tanggaan pimpinan	Data pengelolaan logistik pimpinan dan Data Peminjaman Aset	Arsip, identifikasi dan analisis permohonan permintaan logistik pimpinan dan peminjaman aset	A/R			I			
Dinas Kelautan dan Perikanan	Data pembudidaya, penangkap ikan, pengolah dan pemasar	Data jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan (Perikanan Tangkap, Budidaya,	Menyajikan data tentang pelaku usaha perikanan (Pembudidaya, penangkap, pengolah dan pemasar hasil		A/R					

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxg-UoLkBMCIqxjWjnx3T7wRpyMNP4GQyTMKAWtOgDI/edit#gid=0>

- Responsible** : OPD yang melakukan aktivitas untuk pemenuhan terhadap data output yang didefinisikan.
- Accountable** : OPD yang bertanggungjawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan atribut berdasarkan data output yang dikelola.
- Consulted** : OPD yang memberikan umpan balik dan sarannya serta berkontribusi perbaikan pada data output yang ada.
- Informed** : OPD yang membutuhkan data output untuk mendukung ketugasannya.

Manajemen Data



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



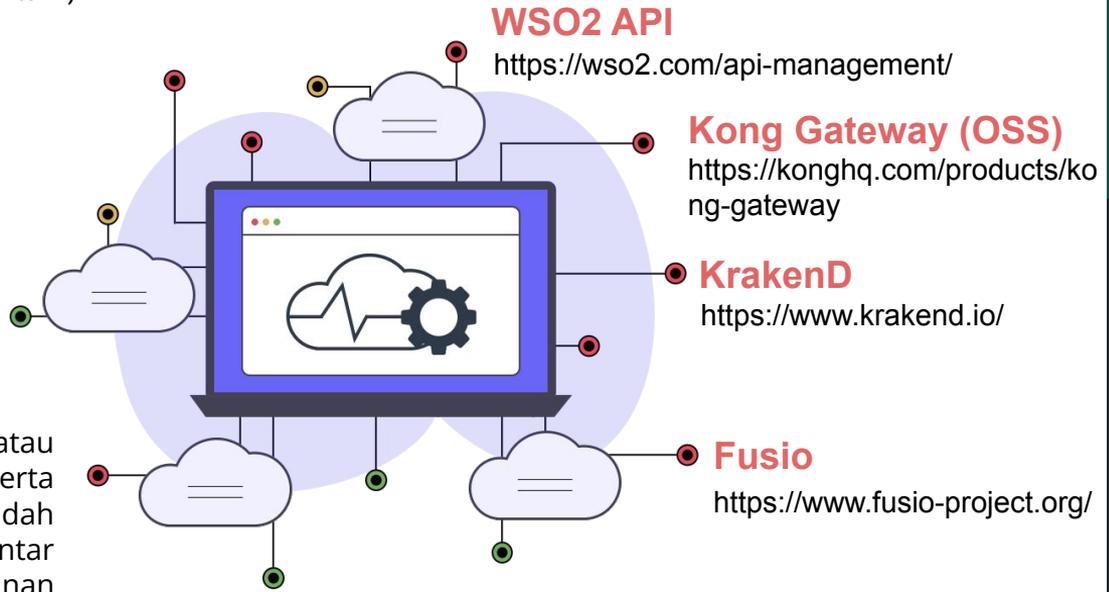
Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.	<ol style="list-style-type: none">1. Peta Rencana SPBE yang berisi program dan kegiatan Manajemen Data2. Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Data, Data sektoral, data set pada layanan open data
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.	Pelaksanaan forum satu data yang melibatkan produsen data, wali data, pembina data
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ol style="list-style-type: none">1. Notulensi/catatan/telaahan/laporan/rekomendasi tindak lanjut terhadap penerapan Manajemen Data2. Undangan rapat pelaksanaan reviu/dokumentasi aktivitas reviu (opsional)
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.	Bukti Dukung melakukan tindak lanjut / perbaikan dari rekomendasi di Notulen

SPLP

(Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan **perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran layanan SPBE**

Pemanfaatan API Manager atau Enterprise Service Bus serta service directory yang sudah dimiliki dan dioperasikan antar layanan



Tujuan:

memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE yang diselenggarakan di internal maupun berkolaborasi secara vertikal dan horizontal





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY



Unduh bahan ini pada QR Code disamping
atau akses di

<https://tinyurl.com/sosialisasispbe2023>

Evaluasi 2021

Cukup

Nilai Indeks
Total

2.3435

Domain

Kebijakan SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE
1.70	1.80	1.55	3.12

Evaluasi 2022

Baik

Nilai Indeks
Total

2.7865

Domain

Kebijakan SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE
1.80	1.90	1.73	3.94

Evaluasi 2022

Baik

Nilai Indeks
Total

2.7865

Domain

Kebijakan SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE
1.80	1.90	1.73	3.94

Evaluasi 2023

Nilai Indeks
Total

3.2475

Domain

Kebijakan SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE
3.00	3.10	2.09	3.82



Evaluasi 2021

Aspek

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1.70
Perencanaan Strategis SPBE	1.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.50
Penyelenggara SPBE	1.50
Penerapan Manajemen SPBE	1.75
Audit TIK	1.00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2.83

Evaluasi 2022

Aspek

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1.80
Perencanaan Strategis SPBE	1.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.75
Penyelenggara SPBE	1.50
Penerapan Manajemen SPBE	1.75
Audit TIK	1.67
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.00



Evaluasi 2022

Aspek

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1.80
Perencanaan Strategis SPBE	1.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.75
Penyelenggara SPBE	1.50
Penerapan Manajemen SPBE	1.75
Audit TIK	1.67
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.00

Evaluasi 2023

Aspek

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.00
Perencanaan Strategis SPBE	3.50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.50
Penyelenggara SPBE	3.50
Penerapan Manajemen SPBE	2.00
Audit TIK	2.33
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.00



Narasi Bukti Dukung

Daftar Dokumen Evaluasi Tahun Lalu

(centang untuk menandai bahwa dokumen tersebut akan digunakan sebagai bukti dukung pada indikator yang dipilih)

- DPA_penyusunan_rencana_induk.pdf
- Nota_dinas_permintaan_persetujuan_penyusunan_rencana_induk_b.pdf
- Surat_pertimbangan_jenis_pengadaan_rencana_induk.pdf
- Draft_MOU.pdf
- MOU_RI_UGM.pdf
- PKS_RI_UGM.pdf

Daftar Dokumen

PERGUB_SPBE_SULBAR.pdf

1. Untuk lampiran bukti dukung sebaiknya label dikode sesuai dengan indikator, misal: [Indikator38_NamaBuktiDukung \(Nama Bukti Dukung yang singkat informatif\).pdf](#)
2. Dalam menarasikan sebaiknya **sesuai dengan kaidah penjelasan dan skeleton** yang ada di ketentuan pedoman [Menpanrb nomor 6 tahun 2023](#) (untuk kedepannya perlu disesuaikan).
3. Diperlukan pembuktian kapabilitas di **level-level kematangan (2,3,4)** yang dilalui dengan **pointer yang baku dan komprehensif**.



Cara Menarasikan

Pengungkapan FAKTA sebaiknya untuk setiap penjelasan bukti dukung memuat apa bukti dukung tersebut (tentang apa) ada di pasal atau halaman mana dan merujuk pada file mana. (agar polanya sama): **Penetapan apa, tentang apa, dimana (pointer pasal dan atau halaman)** dan **file mana**.

MISAL: Indikator 3 - Level-3

Kebijakan terkait Manajemen Data tercantum dan telah **ditetapkan pada Perda No 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE pada Pasal 16 dan 34** sesuai data dukung **3.a-PERDA-No-16-Tahun-2018.pdf** dan **Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE di Kabupaten Karawang yang memuat pengaturan proses Manajemen Data pada Lampiran Halaman 6 & 7 Huruf I angka 1 s/d 6**, sesuai data dukung **3.b-KepBup-No-308-Tahun-2022.pdf** (FAKTA)

Pengaturan pada kebijakan tersebut telah memuat **seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data**. (ANALISIS)

